

ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA DALAM PENDAMPINGAN PENERAPAN SNI CHSE DESA WISATA KATEGORI RINTISAN DAN KATEGORI BERKEMBANG

Lisa Rosiana

Badan Standardisasi Nasional
Email : lisa.rosiana@bsn.go.id

Abstrak

Kolaborasi BSN dengan Kemenparekraf dalam kegiatan pendampingan penerapan SNI CHSE yang mendukung kegiatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi SNI CHSE di desa wisata dalam rangka mendorong peningkatan jumlah penerap SNI dan pemulihan sektor pariwisata di desa wisata. Keterbatasan anggaran tahapan pendampingan BSN untuk mendorong jumlah penerap SNI CHSE, menarik minat penulis untuk melakukan analisis efektifitas biaya dalam pendampingan penerapan SNI CHSE desa wisata kategori rintisan dan berkembang. Analisis dengan menghitung nilai efektifitas, rata-rata biaya langsung dan biaya dengan nilai tambah. Makalah ini menghasilkan kesimpulan tahapan dalam pendampingan penerapan SNI CHSE yang dilakukan oleh BSN untuk mendukung program pemulihan sektor pariwisata dari kemenparekraf secara umum dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemenparekraf dan panduan dari BSN. Berdasarkan analisis biaya, pelaku usaha di desa wisata kategori berkembang lebih efektif mendapatkan pendampingan penerapan BSN sampai dengan siap uji sertifikasi dibandingkan desa wisata kategori rintisan. Kegiatan pendampingan penerapan SNI CHSE yang dilakukan oleh BSN dalam mendukung kegiatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi Kemenparekraf selanjutnya dapat berjalan lebih efektif untuk desa wisata kategori berkembang.

Kata kunci: analisis efektifitas biaya, pendampingan penerapan SNI, desa wisata

Abstract

BSN collaboration with the Ministry of Tourism and Creative Economy in assisting activities in the implementation of SNI CHSE which supports facilitation activities for financing SNI CHSE certification in tourist villages in order to encourage an increase in the number of SNI implementers and the recovery of the tourism sector in tourist villages. The limited budget for the BSN assistance stage to encourage the number of SNI CHSE implementers has attracted the author's interest in conducting a cost effectiveness analysis in assisting the implementation of SNI CHSE in tourist villages in the pilot and developing categories.. Analysis by calculating the effectiveness value, average difrect costs and costs with added value. This paper concludes that the stages in assisting the implementation of SNI CHSE carried out by BSN to support the tourism sector recovery program from the Ministry of Tourism and Creative Economy can generally run in accordance with technical instructions from

the Ministry of Tourism and Creative Economy and guidelines from BSN. Based on cost analysis, business actors in tourist villages in the developing category are more effective in getting assistance in implementing BSN until they are ready for the certification test compared to tourist villages in the pilot category. Assistance activities for the implementation of SNI CHSE carried out by BSN in supporting the Kemenparekraf certification financing facilitation activities can then run more effectively for developing category tourist villages.

Keywords: *a cost effectiveness analysis, the implementation of SNI CHSE, tourist villages.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk kolaborasi antara lembaga pemerintah, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/ Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif (Baparekraf) adalah pertama, penetapan SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata (CHSE) pada November 2021 untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Domestik dan Internasional dalam berwisata dengan aman,nyaman dan sehat sebagai dampak dari pandemik COVID-19 dan menjamin produk dan pelayanan yang diberikan usaha pariwisata. Hal tersebut sebagai langkah pemulihan sektor pariwisata akibat penurunan drastis wisatawan mancanegara karena COVID-19 pada tahun 2020 yaitu sebesar 75% dari tahun 2019. Kedua, pada tahun 2022 BSN bekerja sama dengan Kemenparekraf melakukan pendampingan penerapan SNI CHSE kepada para pelaku usaha wisata di sektor usaha hotel, *homestay* dan rumah makan di berbagai lokasi pariwisata prioritas sebagai *pilot project*.

Pada tahun 2023, BSN dengan anggaran pendampingan yang terbatas kembali melakukan kolaborasi dengan Kemenparekraf untuk melakukan sertifikasi CHSE pada Desa Wisata pemenang ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia). Pengertian desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (SNI 9042:2021). Desa wisata merupakan suatu model yang mempromosikan pola dasar pengembangan berkelanjutan yang menyesuaikan dengan karakteristik desa lokal (Chevalier et al.,2019). Kategori desa wisata ada empat yaitu rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Pendampingan desa wisata mengacu pada SNI 9042:2021 dan KAN K – 08.07.01 Rev 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi (LSPr) Usaha Pariwisata Lingkup CHSE di tingkat desa wisata, minimal 60% dari setiap usaha yang ada di dalam desa wisata harus dinyatakan memenuhi persyaratan SNI CHSE (sertifikat).

Tahapan fasilitasi pembinaan dan pembiayaan SNI CHSE pada desa wisata terdiri dari tahap pertama, sosialisasi (kerjasama Kemenparekraf

dan BSN) diikuti oleh pendaftar di jadesta, Selanjutnya para pemenang 5 besar ADWI mengikuti tahap *awareness* lanjutan berupa tahap penilaian mandiri, tahap analisa kesenjangan (*Gap Analysis*), pemberian rekomendasi kepada Kemenparekraf untuk penetapan pelaku usaha yang berhak mendapat fasilitasi pembiayaan sertifikasi, tahap pengembangan sistem, Implementasi sistem, audit internal dan/atau prasertifikasi, dan pendampingan penutupan temuan audit sertifikasi. Permasalahan keterbatasan anggaran pendampingan penerapan CHSE menjadi dasar untuk melakukan analisis biaya yang efektif (*cost effectiveness analysis*) khusus anggaran untuk pendanaan dengan sedikit intervensi (Brent R.J.,2023). Analisis tersebut akan menghasilkan rekomendasi kategori desa wisata yang lebih efektif dalam pendampingan penerapan SNI CHSE oleh BSN dan fasilitasi pembiayaan sertifikasi oleh Kemenparekraf.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan dalam pendampingan penerapan SNI CHSE sampai dengan siap uji sertifikasi?
2. Bagaimana menentukan Desa wisata yang lebih efektif mendapatkan pendampingan penerapan SNI CHSE dari BSN dan fasilitasi pembiayaan sertifikasi dari Kemenparekraf berdasarkan analisis biaya efektif?

KAJIAN TEORI

A. Tahap Pendampingan Penerapan SNI CHSE

Pada kegiatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi SNI CHSE, tahap pendampingan penerapan SNI CHSE terdiri dari tahap sosialisasi dan penilaian mandiri. Kegiatan ini merupakan alternatif solusi pembiayaan dengan anggaran terbatas melalui analisis biaya yang efektif (*cost effective analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan sasaran yang ingin dicapai analisa biaya yang efektif dari kegiatan pendampingan penerapan SNI yang dilakukan oleh BSN kepada pelaku usaha di desa wisata pemenang ADWI sesuai kategori;
- b. Menentukan nilai efektivitas dari populasi yang siap uji sertifikasi di desa wisata yang jumlahnya paling banyak dalam daftar penerima fasilitasi pembiayaan SNI CHSE dari Kemenparekraf tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif (Sugiyono, 2016) adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah desa wisata Iboih, Sabang, Aceh, desa wisata Bira Tengah, Sampang-Jatim, desa wisata Duren Sari Sawahan, Trenggalek-Jatim, desa wisata Bowele, Kab. Malang, desa wisata Kakaskasen Dua Tomohon-Sulut. Penelitian ini menggunakan

metode pengumpulan data dengan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dalam bentuk *google doc* dan membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan (*gap analysis*) sampai dengan tahap uji sertifikasi dan dilanjutkan analisis biaya yang efektif (*cost effective analysis*) dengan langkah-langkah sesuai formula (Bang et al.,2013) dan (Refasi et al.,2018) sebagai berikut:

- a. Menentukan biaya langsung dalam kegiatan pendampingan penerapan SNI CHSE
Biaya langsung berupa biaya pada tahap penilaian mandiri untuk kunjungan dalam rangka *gap analysis* dan biaya audit internal (prasertifikasi) setelah dilakukan pembinaan dan penyusunan dokumen;
- b. Menghitung besarnya ACER yang diperoleh dari Biaya total rata-rata dihitung diperoleh dari biaya langsung dengan formula:

$$ACER = \frac{\text{Rata - rata biaya}}{\text{Rata - rata efektivitas}}$$

ACER = Rasio rata-rata biaya efektif

- c. Menghitung besarnya ICER yang diperoleh dari selisih ACER dibandingkan selisih nilai efektifitas.

$$ICER = \frac{\Delta C}{\Delta E}$$

ICER: Rasio nilai tambah yang lebih efektif

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Profil Desa Wisata

Terdapat empat kategori Desa Wisata (Widayanti et al.,2019) yaitu: pertama, desa wisata rintisan dengan kriteria antara lain masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata; pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas; belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar; kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh; sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah; swasta), memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata; pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa. Kedua, desa wisata berkembang sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah, sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata, sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Ketiga, desa wisata maju dengan masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya, sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai, masyarakat

sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/kelompok kerja lokal, masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata, sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa. Keempat, desa wisata mandiri dengan masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri, sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia, sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN, pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor sudah berjalan baik, dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata, desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu, membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi).

Tahapan-tahapan kolaborasi BSN dan Kemenparekraf dalam penerapan SNI CHSE di Desa Wisata pemenang ADWI Tahun 2023 sesuai Petunjuk Teknis Deputi bidang Industri dan investasi, Nomor: Juknis/9/II.00.01/D.4/2003: pertama, tahap sosialisasi fasilitasi pembiayaan Sertifikasi SNI CHSE kepada pemenang 5 besar ADWI kategori kelembagaan.

Kedua, tahap penilaian mandiri (*Awareness*) dengan menyebarkan kuesioner berupa Google form yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait tempat penyelenggaraan pariwisata dengan persyaratan disesuaikan dengan tempat (setiap dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan pariwisata baik daya Tarik wisata, restoran/rumah makan, hotel, pondok wisata, pusat informasi pariwisata, tempat penjualan cenderamata dan oleh-oleh pada SNI CHSE Unsur Daya Tarik Wisata dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja mengenai pengelolaan kebersihan di lingkungan daya tarik wisata, pembersihan area dan barang publik, pembersihan dan penggunaan kamar mandi/toilet, penyediaan informasi dan imbauan tertulis tentang pengelolaan kebersihan yang diperlukan, penyediaan fasilitas/sarana kebersihan, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kebersihan di lingkungan daya tarik wisata. Pertanyaan terkait 1. Penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja mengenai pelaksanaan keselamatan di lingkungan daya tarik wisata; 2. Penyediaan informasi dan imbauan tertulis tentang pelaksanaan keselamatan yang diperlukan (mekanisme penyelamatan diri dari bencana alam, mekanisme penyelamatan diri dari kebakaran, peta lokasi titik kumpul yang aman, peta atau petunjuk arah jalur evakuasi, informasi tertulis mengenai nomor telepon penting, 3. Penyediaan fasilitas/sarana keselamatan mengenai perlengkapan peralatan pertolongan kedaruratan paling sedikit oksigen set, alat pemadam kebakaran, alat peringatan apabila terjadi kebakaran atau kejadian bencana lain yang perlu evakuasi, alat komunikasi yang berfungsi dengan baik, 4. Koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan Kesehatan,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Kepolisian setempat untuk pembentukan tim/penunjukkan personal siaga bencana, latihan kesiapsiagaan berkala dan penanganan kondisi darurat keselamatan dan keamanan, 5. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan keselamatan di lingkungan daya tarik wisata. Ada juga pertanyaan terkait karyawan dan pemandu wisata lokal telah mendapat pembekalan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Skor dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di rekap dan diolah oleh Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2023 menjadi penilaian mandiri, berikut pelaku usaha yang telah memenuhi 85% yaitu Desa wisata Iboih, Sabang, Aceh (Kategori Rintisan), Desa wisata Bira Tengah, Sampang-Jatim (Kategori Berkembang), Desa wisata Duren Sari Sawahan, Trenggalek-Jatim (kategori Maju), Desa wisata Bowele, Kab. Malang (kategori Maju), Desa Wisata Kakaskasen Dua, Tomohon- Sulut (kategori Berkembang). Ketiga, tahap pendampingan dalam implementasi SNI CHSE yaitu BSN melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di desa wisata yang telah memenuhi kriteria nilai mandiri sebesar 85%+ yaitu 42 pelaku usaha (desa wisata Iboih, Sabang, Aceh – kategori rintisan), 30 pelaku usaha (desa wisata Bira Tengah, Sampang – Jatim- kategori berkembang), 10 pelaku usaha (desa wisata Duren Sari Sawahan, Trenggalek-Jatim – kategori maju), 10 pelaku usaha (desa wisata Bowele, Kab.Malang – kategori maju), 15 pelaku usaha (desa wisata Kakaskasen Dua, Tomohon- Sulut – kategori berkembang). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan antara lain: identifikasi berdasarkan analisa *gap*. Selanjutnya tahap penyusunan dokumentasi dan pengembangan sistem dan tahap audit internal atau persiapan sertifikasi dan tahap siap uji sertifikasi

Analisis biaya yang efektif (*Cost Effectiveness Analysis*) pada pelaku usaha di desa wisata dilakukan bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerap SNI CHSE di desa wisata. Langkah awal kegiatan ini berkolaborasi dengan Kemenparekraf/Barekraf sebagai penyelenggara ADWI 2023 melalui rangkaian tahapan penerapan SNI CHSE dari sosialisasi, penilaian mandiri, pengembangan system (pendampingan), evaluasi sampai dengan diperoleh pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pembiayaan sertifikasi. Berdasarkan data pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pembiayaan sertifikasi menunjukkan tidak semua pelaku usaha yang memperoleh pendampingan penerapan SNI CHSE akan mendapat kesempatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi, oleh karena keterbatasan anggaran pendampingan sampai dengan sertifikasi. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisis biaya yang efektif (*Cost Effectiveness Analysis*) sebagai bahan pertimbangan kegiatan pendampingan penerapan sampai dengan siap sertifikasi SNI CHSE. Perhitungan analisis biaya efektif dengan tahapan – tahapan sebagai berikut: menghitung besarnya efektivitas,

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Efektivitas

No	Desa wisata	Siap Sertifikasi	Populasi	Efektivitas (%)
1	Kategori Berkembang	15	30	50,00
2	Kategori Rintisan	19	42	45,24

Sumber: hasil olah data dari SK Kemenparekraf dan *Gap Analysis*, 2023
Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai efektivitas desa wisata kategori rintisan lebih kecil dari desa wisata kategori berkembang.

Selanjutnya menghitung besaran biaya pendampingan penerapan SNI CHSE yang terdiri dari biaya penilaian mandiri (*Gap analysis*) dan biaya audit internal dengan harga standar biaya masukan (SBM) rincian sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Biaya Penilaian Mandiri (*Gap Analysis*) dan Audit Internal

No	Biaya Pendampingan	Jumlah	Satuan	Orang	Harga Rupiah (SBM)	Total
1	Desa Wisata Bira (berkembang)					
	Biaya <i>Gap Analysis</i>					30.972.00
-	Tiket pesawat PP	2	PP	3	5.466.00	16.398.00
-	Taksi/Transport (bandara)	8	Orang/kali	3	194.000	2.328.00
-	Hotel (3 malam x 3 orang)	6	Kamar	3	814.000	7.326.00
-	Uang Harian (4 hari x 3 orang)	8	OH	3	410.000	4.920.00
	Biaya Audit Internal					30.972.00

No	Biaya Pendampingan	Jumlah	Satuan	Orang	Harga Rupiah (SBM)	Total
-	Tiket pesawat PP	1	PP	3	5.466.000	16.398.000
-	Taksi/Transport (bandara)	4	Orang/kali	3	194.000	2.328.000
-	Hotel (3 malam x 3 orang)	3	Kamar	3	814.000	7.326.000
-	Uang Harian (4 harix 3 orang)	4	OH	3	410.000	4.920.000
2	Desa Wisata Iboih (Rintisan)					
	Biaya Gap Analysis					39.588.000
	Tiket pesawat PP	2	PP	2	7.519.000	30.076.000
	Taksi/Transport (bandara)	4	Orang/kali	2	123.000	984.000
	Hotel (4 malam x 2 orang)	4	Kamar	3	616.000	4.928.000
	Uang Harian (5 harix 2 orang)	5	OH	3	360.000	3.600.000
	Biaya Audit Internal					39.588.000
	Tiket pesawat PP	2	PP	2	7.519.000	30.076.000
	Taksi/Transport (bandara)	4	Orang/kali	2	123.000	984.000
	Hotel (4 malam x 2 orang)	4	Kamar	3	616.000	4.928.000
	Uang Harian (5 harix 2 orang)	5	OH	3	360.000	3.600.000

Sumber: hasil olah data dari Rincian Anggaran Belanja biaya pendampingan Direktorat PPSPK – BSN Tahun 2023

Perhitungan ACER sebagaimana berikut dirinci dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 5.
Hasil Perhitungan ACER

N o.	Biaya Pendampingan	Populasi (a)	Total Biaya (b)	Biaya Langsung (c)	Siap sertifikasi	Efektifitas	ACER
1	Desa wisata kategori rintisan	42	79.176.000	1.885.143	19	45,24	41.669,82
2	Desa wisata kategori berkembang	30	61.944.000	2.064.800	15	50	41.296,00

Sumber: hasil olah data

Perhitungan ICER yang membandingkan nilai biaya dan efektivitas sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Perhitungan ICER

ΔC	ΔE	ICER ($\Delta C/\Delta E$)
41.296-41.669,82= -374	50-45,24 =4,76	-79

Sumber: hasil olah data

SIMPULAN dan SARAN

Hasil analisa deskriptif dan analisa perhitungan ACER dan ICER sebagai berikut:

- Tahapan dalam pendampingan penerapan SNI CHSE yang dilakukan oleh BSN untuk mendukung program pemulihan sektor pariwisata dari kemenparekraf secara umum dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemenparekraf dan panduan dari BSN.
- Berdasarkan analisis biaya, pelaku usaha di desa wisata kategori berkembang lebih efektif untuk mendapatkan pendampingan penerapan BSN sampai dengan siap uji sertifikasi dibandingkan desa wisata kategori rintisan.

Kegiatan pendampingan penerapan SNI CHSE yang dilakukan oleh BSN dalam mendukung kegiatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi Kemenparekraf

selanjutnya dapat berjalan lebih efektif untuk desa wisata kategori berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Heejung Bang, Hongwei Zhao. (2014). Average Cost-Effectiveness Ratio with Censored Data. *J Biopharm Stat.* 22(2): 401-415. doi:10.1080/10543406,2010,544437
- [BSN] Badan Standardisasi Nasional. (2021). SNI 9042:2021. Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata. Jakarta (ID): BSN
- [KAN] Komite Akreditasi Nasional. (2023). *Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi (LSPr) Usaha Pariwisata Lingkup CHSE*. Jakarta (ID): KAN
- Ninsi Lelantina Refasi, Widya Astuty Lolo, Widdhi Bodhi. (2018). Analisis Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness Analysis) Pada Pengobatan Pasien Malaria Falciparum di RSUD Nabire. *Jurnal Ilmiah Farmasi*
- Agnes Wirdayanti, Amanah Asri, dkk. (2019). *Pedoman Desa Wisata*. Jakarta (ID): Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Jakarta (ID): Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Petunjuk Teknis Deputi Bidang Industri dan Investasi Nomor: JUKNIS/9/II.00.01/D.4/2023 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Sertifikasi SNI CHSE di Desa Wisata Pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Kategori Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE Tahun 2023
- Robert J. Brent. (2023). Cost-Benefit Analysis versus Cost-Effectiveness Analysis from a Societal Perspective in Healthcare. *Int J Environ Res Public Health.* 20(5): 4637. doi: 10.3390/ijerph2005463
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Sylvine Pickel Chevalier, I Komang Gde Bendesa, I Nyoman Darma Putra. (2019). The Integrated touristic villages: an Indonesian model of sustainable tourism?. *Tourism Geographies* 23(3):1-25. doi:10.1080/14616688.2019.1600006.